

Optimalisasi Permodalan Koperasi melalui Kemitraan Strategis dan Layanan Lembaga Keuangan

Aditia Sundayana¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : sundayaditia@gmail.com¹, gmapratama0@gmail.com²

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

Capital is one of the main foundations supporting the sustainability and growth of cooperative businesses. However, many cooperatives in Indonesia still face limited access to adequate capital sources. This study aims to analyze strategies for strengthening cooperative capital through partnership approaches and the utilization of services from both conventional and non-conventional financial institutions. The research method used is a qualitative approach with a case study on several cooperatives in the Cirebon region. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that strategic partnerships with the private sector, state-owned enterprises, as well as financial institutions such as banks, savings and loan cooperatives, and fintech lending, significantly increase the capital capacity of cooperatives. Additionally, institutional support, financial literacy of cooperative managers, and supportive government regulations are key factors in the success of these strategies. This study recommends the need for cross-sector synergy to create an inclusive and sustainable cooperative capital ecosystem.

Keywords: *Cooperatives, Capital, Partnerships, Financial Institutions, Strengthening Strategies*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai suatu entitas usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterbatasan permodalan. Keterbatasan permodalan ini sangat menghambat kemampuan koperasi dalam mengembangkan usaha, meningkatkan layanan kepada anggota, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Mundir, 2016).

Sumber modal koperasi umumnya berasal dari modal sendiri, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, serta modal pinjaman. Namun, partisipasi anggota dalam penyertaan modal seringkali rendah, sementara akses koperasi terhadap sumber permodalan eksternal, terutama dari lembaga keuangan formal, masih sangat terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya jaminan, rendahnya kapasitas manajerial, dan tata kelola koperasi yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan permodalan yang tidak hanya bersandar pada sumber internal, tetapi juga melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan bank dan non-bank (Siti Indah Purwaning Yuwana, 2021).

Kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan dapat membuka akses yang lebih luas untuk penggalangan dana serta menyediakan dukungan administratif dan kelembagaan. Selain itu, kemitraan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi dan mendorong partisipasi lebih besar dari anggota serta pemangku kepentingan eksternal. Strategi kemitraan yang tepat, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan solusi untuk memperkuat struktur modal secara berkelanjutan (Supada & Sari, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan oleh koperasi dalam kemitraan dengan lembaga keuangan guna memperkuat permodalan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti hambatan yang dihadapi koperasi dalam mengakses sumber modal eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan koperasi di Indonesia.

Literatur Review

1. Permodalan Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sumber modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, serta hibah. Sementara itu, modal pinjaman dapat bersumber dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, penerbitan obligasi koperasi, atau sumber sah lainnya.

Keterbatasan modal sering menjadi masalah besar dalam pengembangan koperasi, terutama koperasi kecil dan menengah. Asjimi dan Utama (2024) menjelaskan bahwa lemahnya modal internal disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota dalam menyeter simpanan. Di sisi lain, akses terhadap modal eksternal juga terbatas karena koperasi seringkali belum memenuhi persyaratan administratif dan manajerial yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.

Lebih lanjut, penelitian Mauzu (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi belum mengimplementasikan kebijakan permodalan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permasalahan yang ditemukan antara lain minimnya pemahaman anggota tentang pentingnya permodalan, rendahnya literasi keuangan pengurus, dan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan koperasi.

Dalam konteks koperasi syariah, pembiayaan menghadapi tantangan tersendiri, seperti nilai rendah agunan yang membatasi akses ke pendanaan syariah oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk membangun sistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab sebagai prasyarat penguatan struktur modal.

Penguatan modal koperasi tidak hanya bergantung pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Pendekatan holistik, termasuk peningkatan kemampuan manajer dan kemitraan strategis, sangat penting untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

2. Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis merupakan pendekatan penting dalam memperkuat modal koperasi, terutama ketika menghadapi keterbatasan modal internal dan akses rendah ke pendanaan tradisional. Melalui kemitraan, koperasi dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, lembaga negara, dan sektor swasta, untuk meningkatkan likuiditas dan kapasitas operasional koperasi.

Menurut Rahmawati (2025), kemitraan kolaboratif dengan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan fintech syariah dapat meningkatkan akses keuangan usaha secara kolaboratif. Kemitraan ini memungkinkan koperasi memperoleh modal bergulir, modal operasional, dan dukungan bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anggota. Bentuk kemitraan tidak hanya finansial, tetapi juga meliputi pelatihan manajemen keuangan, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan kolaborasi.

Penelitian oleh Fatimah dan Darna (2020) juga menunjukkan bahwa kemitraan koperasi dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR, BMT, maupun fintech syariah efektif meningkatkan akses pembiayaan usaha. Selain pendanaan, kemitraan ini mencakup pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, pengembangan teknologi informasi, dan penyusunan laporan keuangan koperasi.

LPDB-KUMKM (2023), sebagai lembaga penyalur dana bergulir pemerintah, menyatakan bahwa peningkatan asosiasi koperasi melalui sistem kemitraan berbasis pendampingan dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk mempertahankan keberlanjutan dana. Program ini melibatkan kerja sama dengan lembaga keuangan, universitas, dan sektor swasta dalam bentuk inkubasi bisnis, digitalisasi sistem keuangan, dan akses pendanaan berbasis kinerja.

Dengan demikian, kemitraan strategis merupakan solusi kolaboratif untuk mengatasi keterbatasan modal koperasi sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga eksternal terhadap tata kelola koperasi. Memperkuat jaringan kemitraan sinergis juga menjadi kunci integrasi koperasi ke dalam lembaga ekonomi yang kompetitif.

3. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memegang peran strategis dalam memperkuat struktur modal koperasi, khususnya dalam menyediakan akses ke sumber pendanaan eksternal. Hal ini

diperlukan untuk pengembangan usaha koperasi. Secara umum, koperasi dapat bermitra dengan bank maupun lembaga keuangan non-bank, seperti BPR, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan fintech lending.

Menurut Anwar (2023), lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam pendanaan, tetapi juga dalam penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, misalnya melalui pelatihan manajemen keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta penilaian kelayakan usaha koperasi. Hubungan kemitraan ini meningkatkan kredibilitas koperasi dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk anggota dan mitra eksternal.

Studi oleh Alya et al. (2024) menunjukkan bahwa koperasi dengan hubungan baik ke lembaga keuangan cenderung lebih adaptif dalam mengakses pendanaan berbasis kinerja. Produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman modal kerja, dan dana bergulir dari LPDB-KUMKM menjadi alternatif strategis untuk memperluas basis modal dan memperkuat daya saing koperasi.

Selain pembiayaan tradisional, pengembangan teknologi keuangan membuka peluang kolaborasi koperasi dengan fintech peer-to-peer (P2P) yang menyediakan layanan keuangan cepat, fleksibel, dan berbasis digital. Widiana (2024) mencatat bahwa fintech P2P menjadi alternatif penting dalam memperluas akses pembiayaan koperasi.

Ke depan, sinergi koperasi dengan lembaga keuangan perlu diarahkan pada kolaborasi jangka panjang berbasis akuntabilitas, manajemen risiko, dan literasi keuangan yang baik. Peran aktif lembaga keuangan sebagai mitra koperasi tidak hanya mendukung permodalan, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan koperasi menuju tata kelola yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi penguatan permodalan koperasi melalui kemitraan dan peran lembaga keuangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, serta strategi yang diterapkan oleh koperasi dalam memperkuat modal usaha tanpa menitikberatkan pada pengukuran kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tidak langsung melalui teknik penelitian dokumen dan literatur. Teknik ini memungkinkan pengambilan data sekunder dari berbagai sumber terkait topik penelitian, seperti laporan tahunan koperasi, dokumen kebijakan dan regulasi tentang koperasi dan permodalan, publikasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM, serta lembaga keuangan terkait, dan jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas permodalan koperasi, kemitraan, dan peran lembaga keuangan.

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian melalui sumber tertulis dan digital yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur secara komprehensif, membandingkan temuan dari studi sebelumnya,

serta menyusun kartu konsep praktik terbaik yang diterapkan oleh koperasi di berbagai komunitas lokal.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi topik, pola, dan strategi umum yang muncul dari dokumen serta referensi yang diselidiki. Dari hasil analisis tersebut, peneliti mengembangkan interpretasi komprehensif mengenai bagaimana koperasi dapat memperkuat struktur modal mereka melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan kemitraan strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, koperasi dituntut untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memperkuat struktur permodalan mereka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi keterbatasan modal, salah satunya melalui kemitraan strategis dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan literatur, terdapat beberapa strategi utama yang berhasil diterapkan oleh koperasi dalam penguatan modal, yang akan dibahas secara rinci berikut ini.

Kemitraan dengan Lembaga Keuangan

Kemitraan dengan lembaga keuangan menjadi strategi sentral dalam memperkuat struktur modal koperasi. Berdasarkan hasil analisis, banyak koperasi di Indonesia telah memulai kerja sama strategis dengan berbagai lembaga keuangan, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dana pengembangan koperasi, serta lembaga keuangan UMKM seperti LPDB-KUMKM. Bentuk kemitraan ini umumnya meliputi tiga aspek utama: penyediaan akses pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal kerja, kredit investasi, atau dana bergulir untuk pengembangan usaha; peningkatan kapasitas manajerial koperasi melalui pelatihan keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta pelatihan manajemen risiko; dan penguatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana koperasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada lembaga mitra.

Temuan dari Survei LPDB-KUMKM (2023) menunjukkan bahwa koperasi yang mendapat dukungan lembaga cenderung mengalami peningkatan modal operasi dan jumlah anggota aktif, berkat kemudahan akses pendanaan dan program bantuan intensif. Laporan tahunan koperasi mitra BPR juga mencatat pertumbuhan aset setelah menerima pinjaman dengan sistem pembayaran yang disesuaikan arus kas koperasi. Selain itu, kemitraan ini tidak terbatas pada penggalangan dana, tetapi juga pada pengembangan sistem keuangan koperasi. Beberapa koperasi di sektor tabungan, pinjaman, dan pertanian bekerja sama dengan platform fintech untuk mendigitalkan sistem pembayaran dan pencatatan transaksi, yang meningkatkan efisiensi operasional serta citra koperasi sebagai lembaga yang adaptif terhadap teknologi.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, seperti keterbatasan pemahaman manajemen koperasi terhadap proses kredit, pelaporan keuangan yang kurang memadai, dan minimnya aset tetap sebagai jaminan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola keuangan internal dan kredibilitas koperasi sebagai mitra bisnis yang dapat dipercaya sangat penting. Secara keseluruhan, kemitraan dengan lembaga keuangan terbukti efektif mengatasi keterbatasan modal sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi.

Kolaborasi dengan Pemerintah dan BUMN

Selain lembaga keuangan, penguatan modal koperasi juga dilakukan melalui kerja sama strategis dengan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses koperasi terhadap sumber daya modal, dukungan kelembagaan, serta integrasi ke dalam rantai pasok nasional. Program pemerintah seperti Dana Bergulir Revolving Fund dari LPDB-KUMKM, bantuan modal dan peralatan dari Kementerian UKM, serta insentif keuangan berupa subsidi bunga pinjaman menjadi instrumen utama pendukung penguatan modal koperasi. Pemerintah daerah juga berperan signifikan melalui penyediaan dana hibah dan promosi koperasi besar.

Sementara itu, kolaborasi dengan BUMN difokuskan pada kemitraan bisnis berbasis model terintegrasi, di mana koperasi menjadi mitra penjualan, penyedia bahan baku, atau layanan pendukung rantai pasok. Contohnya, PT Pupuk Indonesia bekerja sama dengan koperasi tani dalam distribusi pupuk bersubsidi, serta PT PLN dalam pengelolaan kebutuhan logistik. Studi oleh Kementerian UKM (2023) mengungkapkan bahwa koperasi yang bekerja sama dengan BUMN memiliki stabilitas modal yang lebih baik dan ketahanan bisnis yang lebih tinggi, meskipun mereka harus memenuhi persyaratan manajemen dan pelaporan yang ketat.

Namun, kolaborasi ini menghadapi tantangan berupa birokrasi yang kompleks, ketimpangan informasi program, serta ketidakpastian prediksi kooperatif dalam memenuhi persyaratan manajemen. Oleh karena itu, keberhasilan kemitraan pemerintah-BUMN sangat bergantung pada kemampuan internal koperasi dalam membangun akuntabilitas, koordinasi, dan kepemimpinan profesional.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Tata Kelola

Peningkatan literasi keuangan dan tata kelola koperasi merupakan prasyarat penting dalam penguatan modal. Manajemen dan anggota koperasi yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu mengelola dana secara bertanggung jawab,

menyiapkan laporan keuangan yang transparan, serta menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal secara efektif. Studi Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menyebutkan bahwa rendahnya kapasitas keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses koperasi terhadap sumber modal eksternal. Kegagalan dalam memahami prinsip akuntansi, manajemen risiko, dan tata kelola mengakibatkan rendahnya kredibilitas koperasi di mata lembaga keuangan.

Tata kelola koperasi yang profesional dan transparan menjadi daya tarik utama bagi investor, lembaga keuangan, dan mitra bisnis. Penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi koperasi dalam ekonomi terbuka. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi, LPDB-KUMKM, dan OJK telah menyediakan pelatihan serta program pendukung untuk meningkatkan kapasitas internal koperasi. Inisiatif seperti koperasi modern dan digitalisasi sistem keuangan menekankan pentingnya profesionalisme dan adaptasi teknologi dalam tata kelola koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penguatan modal koperasi tidak hanya bergantung pada modal internal, melainkan juga memerlukan strategi dan pendekatan kolaboratif. Kemitraan dengan lembaga keuangan merupakan salah satu upaya paling efektif untuk membuka akses penggalangan dana yang mendukung, khususnya melalui sistem pembiayaan produktif, peningkatan kapasitas manajerial, serta dukungan digitalisasi.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil melalui program bantuan modal, pembentukan kelompok usaha, dan jaminan pasar. Peningkatan kapasitas keuangan serta penerapan manajemen koperasi yang profesional menjadi prasyarat utama agar koperasi dapat mengelola instrumennya secara transparan dan berkelanjutan.

Apabila ketiga strategi ini diintegrasikan secara konsisten, maka koperasi dapat memperkuat posisinya sebagai pilar ekonomi yang mandiri, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

REFERENSI

- Alya, U., Rahman, T., Ekonomi, S., Fakultas, S., Unoiversitas, K., Madura, T., Studi, P., Syariah, E., Keislaman, F., & Trunojoyo, U. (2024). Ulka Alya. 10(1), 74–84.
- Anwar, S. (2023). Strategi lembaga keuangan mikro syariah (lkms) dalam mengatasi gelombang rush money dan pandemi covid-19 tesis.
- Asjimi, R., & Utama, rony edward. (2024). Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan. Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan, 2(1), 91–98.

- Fatimah dan Darna. (2020). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 127–138.
- Mauzu, F. (2023). Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian , Khususnya Pasal 44 Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(25), 27531–27539.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/11108/8787>
- Mundir, A. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH. 1–23.
- Rahmawati, S. T. (2025). Economics and Digital Business Review Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Dan. 6(2), 1349–1362.
- Siti Indah Purwaning Yuwana. (2021). Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 35–48.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.400>
- Supada, W., & Sari, L. S. E. (2022). Strategi Pengembangan Koperasi Sektor Riil Untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Buleleng. *Saraswati Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, 01(02), 1–13.
<https://ejurnal.bulelengkab.go.id/index.php/saraswati/article/view/15>
- Widiana, I. N. W. (2024). KEUANGAN BISNIS DIGITAL.